BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan puncak ciptaan dengan bentuk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya.[1] Sebagai makhluk yang dikaruniai akal, pemahaman, dan bentuk yang sempurna, manusia dijadikan *khalīfah* oleh Allah swt di muka bumi.[2] Manusia sebagai *khalīfah* hidup di muka bumi dan diserahi untuk memakmurkannya.[3] Sehingga, urusan di dunia telah diserahkan Allah kepada manusia.[4]

---

[1] Al-Qur'an, 95: 4.

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya" .

[2] Ibid., 2: 30 .

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalīfah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalīfah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Dalam al-Qur'an, 6: 165, juga dijelas tentang manusia yang dijadikan khalīfah di bumi, Ibid., 217.

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَـٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَـٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Dan Dia-lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa (khalīfah) di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.".

[3] Ibid., 11: 61.

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ

"Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya".

[4] Ibid., 33: 72.

Manusia sejati (*insān kāmil*) adalah mereka yang kegiatan mental dan fisiknya merupakan suatu keseluruhan yang utuh. Kerja jasmani dan rohani bukanlah dua kenyataan yang terpisah. Ia tidak mengenal kehidupan duniawi yang jauh dari nilai ukhrawi. Baginya pengabdian merupakan prioritas yang utama, yaitu mengabdi pada Tuhan semesta alam, masyarakat, bangsa dan negara sehingga hiasan yang muncul darinya adalah ketulusan dan jauh dari kepentingan-kepentingan sesaat yang bersifat pragmatis.

Karakteristik di atas merupakan tipologi *insān kāmil* yang keberadaannya sangat sulit ditemukan dalam kehidupan yang komplek ini. Ulama atau kiai dalam pandangan masyarakat, terutama masyarakat awam dianggap sudah memenuhi kriteria ini. Posisi kiai berada pada puncak klasifikasi sosial dalam masyarakat dan mendapat penghormatan yang luar biasa. Namun demikian, asumsi ini pada akhir-akhir tahun belakangan lambat laun mulai memudar. Banyak persoalan yang melatar belakanginya, salah satunya adalah disebabkan adanya peran ulama atau kiai yang pada mulanya memprioritaskan pada kepentingan umat secara keseluruhan beralih pada area politik praktis yang identik dengan kepentingan kelompoknya.

Dunia kiai dan pesantren sangat menarik untuk dibicarakan apalagi dikaitkan dengan dunia politik dan pendidikan. Studi-studi sosial tentang pemimpin-pemimpin Islam di Indonesia menunjukkan bahwa kiai adalah

---

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amana kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh".

tokoh yang mempunyai posisi strategis dan sentral dalam masyarakat. Posisi ini terkait dengan kedudukannya sebagai orang terdidik. Sebagai elit terdidik kiai memberikan pengetahuan kepada masyarakat pedesaan terutama terkait dengan keislaman dan pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional adalah sarana penting untuk melakukan pendidikan kepada masyarakat desa tersebut. Di samping itu kiai menjadi patron kepada siapa masyarakat merujuk dan bergantung. Posisi sentral kiai dapat dilihat dalam pola patronase ini, terutama pola ini menghubungkan dan mengikat kiai dengan santrinya.[5]

Dalam pesantren, kiai merupakan tokoh sentral yang mempunyai peranan sebagai *decision maker* (pembuat keputusan) dalam segala hal. Kiai diyakini mempunyai eksistensi karismatik yang merupakan perwujudan dari doktrin *al-'ulamā' warāthat al-anbiyā'* (ulama adalah pewaris para nabi).

Pengakuan masyarakat bahwa kiai pewaris para nabi memberikan legitimasi bahwa kiai adalah sosok yang paling menentukan dalam mengatasi berbagai macam persoalan yang dihadapi umat, baik berupa masalah pribadi, sosial ekonomi, maupun persoalan yang berkaitan dengan politik. Dengan demikian, keanekaragaman persoalan yang selalu memerlukan solusi dari kiai, khususnya masalah-masalah politik, kekuasaan dan kenegaraan menjadikan kiai dan pesantren tidak hanya berperan dalam memberikan wejangan keagamaan, tapi juga terlibat dalam persoalan politik.

Kiai, karena posisinya, telah memainkan peran perantara bagi umat Islam dengan memberi mereka pemahaman tentang apa yang sedang terjadi pada tingkat nasional. Masyarakat paham bahwa diri mereka tidak memiliki

---

[5] Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKIS, 2003), 1.

pengetahuan yang cukup untuk memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tingkat nasional. Hubungan yang dekat antara kiai dan penduduk desa tersebut kemudian menempatkan kiai pada posisi sebagai penerjemah yang memberikan penjelasan dalam konteks agama dan mengklasifikasikan sebagai masalah bangsa pada umumnya. Posisi menonjol kiai ini lebih nampak ketika partai politik secara intens memasuki masyarakat, ini terjadi karena kiai adalah bagian dari elit politik, suatu posisi yang strategis dan diklaim mempunyai kekuasaan yang sah untuk menyatakan umat dalam menghadapi berbagai ancaman yang nyata dari kelompok-kelompok lain.

Pada era sekarang ini, terwujudnya harapan partai-partai politik dan diperbolehkannya penggunaan Islam sebagai nama dan asas partai menjadikan banyak kiai masuk dalam partai-partai politik, terutama partai Islam, meskipun ada sebagian kiai yang tidak mau masuk atau terlibat dalam partai politik tertentu dan lebih mengkonsentrasikan dirinya pada pembinaan umat secara umum dan pondok pesantren pada khususnya.

Keterlibatan kiai dalam partai-partai politik dengan sendirinya menjadikan mereka harus berkiprah guna memenangkan partainya. Di satu sisi hal ini akan membawa dampak positif karena dapat ikut serta memberikan pendapat dalam proses pengambilan kebijakan umum. Namun di sisi yang lain, hal ini disinyalir juga memiliki dampak negatif karena mereka berperan untuk mempengaruhi umat memilih partainya. Hal ini tercermin dalam isu-isu sosial dan politik terutama dalam kasus pemilu.[6]

---

[6] Nanang Tahqiq, *Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 199.

Keterlibatan kiai dalam politik selama ini kerap menimbulkan kontroversi. Di satu sisi, keterliban kiai dalam politik dimaknai sebagai sebuah dinamika politik pesantren yang mempunyai efek positif, karena akan mendorong terciptanya masyarakat yang partisipatif dan kritis, menggerakkan modal sosial publik untuk bersama membangun kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang lebih baik dan mandiri, serta memberikan kebebasan terhadap setiap individu untuk mengekspresikan pemikiran dan tindakannya tanpa adanya kungkungan monopoli kebenaran mutlak. Hal ini disebabkan oleh setiap orang dimungkinkan memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda.

Namun disisi yang lain, keterlibatan kiai dalam politik dianggap tidak produktif dan berefek negatif karena seringkali membingungkan dan meresahkan masyarakat, bahkan tidak jarang menjadi pangkal perpecahan dan konflik sosial dalam skala massif. Perbedaan dan perubahan sikap pandang pesantren juga akan memunculkan friksi antar pendukung ideologi/aliran yang berbeda. Dukungan tersebut tidak terlepas dari politisasi agama (penggunaan simbol-simbol agama). Mobilisasi inilah yang memunculkan pergumulan politik antar pesantren yang pada akhirnya terjadi polarisasi di tengah masyarakat.[7]

Sudah lazim diketahui bahwa para kiai memiliki pilihan dan orientasi politik yang berbeda baik sebagai pribadi maupun sebagai pemimpin pesantren. Karena perbedaan tersebut tidak terjembatani dalam suatu pola komunikasi yang konstruktif, maka muncul perselisihan yang melibatkan

[7] Kamaruddin, *Partai Politik Islam di Pentas Reformasi: Refleksi Pemilu 1999 untuk Pemilu 2004* (Jakarata: Visi Publishing, 2002), 51.

institusi pesantren masing-masing pada derajat tertentu. Akibatnya timbul friksi dan faksionalisme yang sering berujung pada perselisihan yang meluas, mulai dari perbedaan politik kemasalah ekonomi, sosial hingga hubungan kekerabatan.

Penyebab utama konflik antar kiai dan pesantren pada umunya berupa adanya perbedaan organisasi keagamaan dan perbedaan pilihan politik, semisal perbedaan dalam memberikan dukungan terhadap seorang calon kepala desa, bupati, gubernur maupun presiden.

Menariknya, pada saat terjadi perselisihan antar kiai justru muncul fenomena baru yaitu mulai timbul ketidakpatuhan santri terhadap pilihan kiainya. Perbedaan politik ini umumnya sering terjadi di luar pesantren (santri yang sudah menjadi alumni). Adapun perbedaan pilihan politik antara santri yang masih aktif di pesantren dengan kiainya hanya sedikit.

Fenomena ini menarik untuk dikaji karena akan memberikan peta baru bahwa kegiatan politik pesantren tidak lagi monopolik dan hegemonik, namun mengalami dinamisasi yang lebih demokratis dan rasional. Fenomena ini dipotret dengan sangat baik oleh Nur Syam dalam rilis hasil penelitiannya perihal Perilaku Politik Santri dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2008. Dijelaskan bahwa dari 486 responden yang bersal dari pesantren besar di Jawa Timur, 46,9 % santri tidak lagi mengikuti arahan kiai dalam Pilgub 2008. 276 renponden menyatakan merasa tidak bersalah jika tidak mengikuti pilihan kiainya. Hanya 20% yang merasa cocok dengan pilihan kiainya.[8]

[8] Nur Syam, "Perilaku Politik Santri dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2008", *Jawa Pos*, (9 Agustus, 2007), 31.

Pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata kecamatan Palengaan kabupaten Pamekasan merupakan salah satu pondok pesantren terbesar dengan jumlah santri dan alumni yang banyak, serta memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perhelatan politik di kabupaten Pamekasan bahkan dalam lingkup propinsi Jawa Timur. K.H.R. Abd Hamid Mahfudz Zayyadi disamping sebagai pengasuh utama pesantren tersebut beliau juga berperan dalam politik praktis.

K.H.R. Abd Hamid Mahfudz Zayyadi atau lebih dikenal dengan sebutan K.H. Hamid tidak terlibat langsung sebagai aktor politik dan masuk dalam struktural partai tertentu, tetapi beliau hanya sebagai partisipan PPP. Walaupun sebagai partisipan, beliau menjadi figur sentral di PPP, sehingga apapun yang menjadi persoalaan pada akhirnya meminta fatwa beliau.

Keberadaan K.H. Hamid dalam dunia politik, sungguh kondisi yang demikian sebenarnya sangat kontradiktif dengan keseharian beliau di pesantren dengan nuansa Islami yang sebelumnya selalu diwarnai dengan mengajar kitab-kitab keislaman dan memberikan pengajian. Namun, di sisi lain dunia politik menunjukkan syarat dengan intrik dan konflik di dalamnya.

Terkait hal itu, secara gradual keadaan yang demikian telah menyeret eksistensi K.H. Hamid pada kondisi yang serba dilema. Artinya, pada satu sisi kiai harus melakukan gerakan moral, namun disisi lain, kiai harus bergelut dengan aktifitas politik praktis, sebagai tugas sampingan. Sehingga, dengan sendirinya beliau akan kesulitan membagi waktunya secara proporsional dalam melakukan gerakan moral dan sekaligus gerakan politik.

Akibatnya tidak heran jika gerakan moral kiai mengalami *set back.* Misalnya, santri kurang terurus yang disebabkan K.H. Hamid sudah tidak lagi bisa fokus terhadap pendidikan para santrinya. Sehingga, berdampak pada pendidikan pesantren yang dipimpinnya.

Untuk itu, penelitian ini mencoba membidik hubungan K.H. Hamid dengan situasi politik dan dalam dunia pendidikan. Sebab, dalam penelitian ini adanya hubungan beliau yang bergerak dalam politik praktis dengan pesantren yang di asuhnya.

Dari latar belakang tersebut, menjadikan alasan penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul Politik Kiai dan Pendidikan Pesantren (Studi tentang Peran Politik Kiai dan Dampaknya terhadap Pendidikan Pesantren yang Dipimpinnya di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan mendasar yang telah dijelaskan di atas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang politik kiai dan pendidikan pesantren. Ketertarikan terhadap penelitian ini memunculkan beberapa pertanyaan sebagai sebuah kegelisahan akademik. Apakah yang memotivasi kiai terlibat dalam politik praktis? Apakah kiai tetap ditaati, dihormati dan diikuti segala tindakannya, atau ada perubahan sebagai perkembangan terakhir? Apakah kiai yang terlibat dalam politik praktis konsentrasinya terpecah yang ditandai dengan terpecahnya konsentrasi kiai dalam perjuangan partai dan pesantren sebagai dasar keilmuan murni? Apakah keterlibatan kiai dalam politik praktis memiliki

dampak negatif terhadap perkembangan pesantren yang diasuhnya? Dari beberapa pertanyaan di atas kemudian penulis sederhanakan dalam rumusan masalah.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi keterlibatan kiai dalam politik sebagai sosok elit[9] yang mempunyai otoritas kepemimpinan. Penelitian ini tidak melihat elit politik dalam merebut kekuasaan sebagai objek penelitian. Tetapi bagaimana kiai mengusung calon tersebut, sehingga kiai terlibat dalam pertarungan itu. Penting juga bagaimana dampaknya dalam kiai berpolitik terhadap pendidikan pesantren yang dipimpinnya. Subyek kiai dalam penelitian ini dibatasi pengasuh pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Desa Pana'an Kecamatan Palenga'an Kabupaten Pamekasan.

Pemilihan lembaga pendidikan pesantren ini beralasan bahwa, pondok pesantren ini merupakan salah satu pondok pesantren terbesar dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perhelatan politik di Kabupaten Pamekasan bahkan dalam lingkup Propinsi Jawa Timur serta kiai/pengasuhnya berperan serta dalam politik praktik.

C. Rumusan Masalah

Agar dalam pembahasan penelitian ini dapat tercapai dengan baik dan terarah, maka peneliti mengajukan rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran politik kiai pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan?

---

[9] Kiai juga disebut sebagai "elit agama". Istilah elit berasal dari bahasa Inggris "*elite*" yang juga berasal dari bahasa Latin "*eligere*", yang berarti memilih. Istilah elit digunakan pada abad ke tujuh belas, untuk menyebut barang-barang dagangan yang mempunyai keutamaan khusus, yang kemudian digunakan juga untuk menyebut kelompok-kelompok sosial tinggi seperti kesatuan-kesatuan militer atau kalangan bangsawan atas**.** Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia,1994), 24.

2. Apa motivasi dan orientasi peran politik kiai pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana dampak peran politik kiai pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan terhadap perkembangan pondok pesantren yang dipimpinnya?

D. Tujuan Penelitian

Secara operasional, penelitian ini bertujuan ingin mendeskripsikan dan mengidentifikasi secara empirik mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan politik kiai dan pendidikan pesantren diantaranya adalah:

1. Mendeskripsikan dan mengidentifikasi peran politik kiai pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.
2. Mendeskripsikan dan mengidentifikasi orientasi dan motivasi peran politik kiai pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan?
3. Mendeskripsikan dan mengidentifikasi dampak peran politik kiai pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan dalam politik terhadap perkembangan pondok pesantren yang dipimpinnya?

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mengarah pada hal yang sifatnya mendasar yaitu sebagai wahana pengembangan dan pendalaman pengetahuan pendidikan baik bagi peneliti maupun bagi masyarakat umum yang kemudian bisa membentuk pola pikir terbuka dan bernilai.

Penelitian ini diharapkan mempunyai dua manfaat atau nilai guna yaitu nilai guna secara teoritis dan nilai guna secara empirik atau praktis.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan salah satu masukan bagi pengasuh pesantren untuk mengkaji ulang keterlibatannya dalam politik praktis dan bisa menanggulangi dampaknya terhadap pendidikan pesantren.

Adapun secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna juga bagi:

1. IAIN Sunan Ampel Surabaya

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang politik kiai dan pendidikan pesantren dan menjadi salah satu sumber kajian bagi kalangan dosen dan mahasiswa baik sebagai bahan kajian dalam perkuliahan maupun untuk kepentingan penelitian yang pokok kajiannya terdapat kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan.

2. Mahasiswa Konsentrasai Pendidikan Islam

   Sebagai bahan dalam kajian-kaijian ilmu pendidikan, politik dan keagamaan serta sebagai bahan tambahan dan wawasan tentang politik kiai dan pendidikan pesantren baik di pondok pesantren yang salaf maupun atau modern serta di lembaga pendidikan lainnya yang masih terkait dengan kajian ini.

3. Perpustakaan

   Merupakan masukan yang sangat penting sebagai temuan ilmiah dan dapat menambah koleksi perpustakaan sehingga dapat dijadikan bahan bacaan dan refrensi.

4. Lembaga (pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)

   Hasil penelitian ini akan memberikan koreksi dan kontribusi dalam upaya peningkatan lembaga pendidikan pesantren yang bermutu.

5. Peneliti

   Hasil penelitian ini akan menjadikan salah satu pengalaman yang akan memperluas cakrawala pemikiran dan wawasan keilmuan, khususnya dalam masalah politik kiai dan pendidikan pesantren yang terjadi di pondok pesantren di seluruh tanah air.

6. Kiai/Pengasuh

   Hasil penelitian ini berfungsi sebagai masukan dalam mengembangkan pendidikan pesantren kedepan.

F. Kerangka Teoretik

Pijakan teori yang digunakan dalam meneropong pergumulan politik kiai dalam penelitian ini menggunakan teori elit. Teori elit sebagaimana gambaran pareto, bahwa dalam kehidupan sosial masyarakat terbagi dalam dua kelas atau kelompok. Kelas pertama, adalah kelas strata atas yang disebut elit. Kelas elit diklasifikasi lagi dalam dua bagian, yaitu; *governing elite* dan *non governing elite.* Kelas dua, merupakan kelas strata rendah yang disebut

non elite.[10] Pareto lebih lanjut menegaskan seperti yang dikutip Patrick Dunleavy, mendefinisikan elit sebagai orang-orang yang mempunyai peran tertinggi dalam setiap aktivitas dan kegiatan.[11] Hal itu juga ditegaskan dalam *"The American Political Dictionary"* elit mempunnyai arti seseorang yang melakukan kontrol dan kendali baik dalam bidang politik, ekonomi dan keputusan sosial.[12]

Definisi dan gambaran klasifikasi ini memberikan justifikasi bahwa kiai merupakan elit agama (*relegius elite*) yang mempunyai status tinggi dalam komunitas pesantren, santri, alumni dan masyarakat partisipan. Sorotan dalam penelitian ini kiai sebagai *religious elite* yang berposisi sebagai *non governing elite,* yang mengusung elit politik dalam perebutan kekuasaan politik.[13] Disinilah akan dilihat bagaimana elit kiai tersebut memobilisasi kekuatan santrinya dan masyarakat untuk kemenangan calon yang diusungnya.

Selain dari aspek teori elit, perilaku manusia dapat dilihat dari dari aspek psikologi. Sebagaimana yang digambarkan oleh Jalaluddin Rakhmat[14] bahwa menurut Carl Rogers setiap manusia hidup dalam pengalaman yang bersifat pribadi. Manusia berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan dan mengaktualisasikan diri. Individu akan bereaksi pada situasi sesuai

---

[10] S.P. Varma, *Modern Political Theory A Critical Survey* (India: Vicas Publishing House Pvt Ltd, 1975), 228.

[11] Patrick Dunleavy and Brendan O'leary, *Theories Of The State The Politics Of Liberal Democracy* (London: Macmilan Education Ltd, Hounmills, Basingstoke, Hampshire RG21 2xS, 1991), 136.

[12] Jack C. Planoad Milton Greenberg, *The American Political Dictionary* (USA: Harcourt College Publisher, 2002), 84.

[13] Zainuddin Syarif, "Dinamika Politik Kiai Dan Santri Dalam Pilkada Pamekasan" (Disertasi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 9.

[14] Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remadja Rosdakarya, 1985), 40-54.

dengan persepsi tentang dirinya dan dunianya. Ia bereaksi pada realitas seperti yang dipersepsikan olehnya dengan cara yang sesuai dengan konsep dirinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sosial sangat beragam.

William Mc Dougal menyebutkan faktor personal, seperti *instink*, yang mempengaruhi perilaku manusia. Dalam perspektif yang berbeda namun sebenarnya dapat melengkapi pandangan Dougal, Edward Ross mengemukakan faktor situasional merupakan variabel yang mempengaruhi perilaku manusia. Ross memberikan gambaran sebagai berikut; seseorang bisa sangat terbuka pada istri atau suami namun dapat berjiwa tertutup pada saat di kantor. Atau seseorang berlaku lemah lembut pada saat meminjam uang namun berubah menjadi "buas" pada saat ditagih. Di kantor, seseorang dapat bersikap sangat dominan, keras, kepala batu, galak dan sebagainya, namun pada saat di rumah tunduk pada istri seperti kerbau dicocok hidungnya.

Teori perilaku sebagaimana dikemukakan oleh Edward Ross itu dapat digunakan sebagai piranti teoritis untuk mengurai perilaku politik kiai pada saat bertindak sebagai pemimpin dalam ritual keagamaan di lingkungan pesantren, tarekat dan sejenisnya dengan peran dan fungsi yang berbeda pada saat kiai itu berada dalam dunia politik praktis.

Sebagai pemimpin keagamaan, figur kiai dicitrakan sebagai orang yang bersih dari kepentingan *(free from value)* terutama dari hal-hal duniawi, menjadi panutan dalam tindakan dan perilakunya di mata umat serta diyakini sebagai pewaris ajaran nabi. Para kiai dengan kelebihan pengetahuannya dalam agama Islam seringkali dilihat sebagai orang yang senantiasa

memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam, sehingga mereka dianggap memiliki kedudukan yang tidak terjangkau terutama oleh orang awam.[15]

Peranan penting seorang kiai dalam kehidupan beragama di masyarakat, tidak dapat dilepaskan dari ajaran-ajaran agama sebagai pedoman hidup masyarakat. Dari realitas sosial inilah, diakui atau tidak, sosok kiai memiliki *power* serta otoritas yang cukup tinggi untuk memolisasi massa.[16] Bahkan hingga batas tertentu, seorang kiai telah menjadi "rezim" penguasa tak terkecuali dikalangan masyarakat Madura.[17] Asumsi ini diperkuat dengan adanya fakta yang terjadi selama ini, Pemilu misalnya, setiap partai peserta pemilu, mencoba memanfaatkan kiai sebagai juru kampanye untuk meningkatkan perolehan suara partainya.

Keterlibatan mereka dalam dunia yang sering di sebut wilayah "abu-abu" itu, menjadi menarik bukan hanya untuk diperbincangkan tetapi juga untuk dipertanyakan; "Gerakan moral, atau Politik?'' dua pertanyaan bertolak belakang di atas, masih menunggu jawaban atas kian banyaknya pemuka agama yang merangkap jabatan. Sebagai kiai yang mengurusi pesantren *plus* politisi.

Dalam penelitian ini, ada beberapa istilah yang akan di definisikan, agar dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini terdapat persamaan persepsi dan sejalan dengan penulis.

---

[15] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1984), 55-57.

[16] Mien Ahmad Rifai, *Manusia Madura: Pembawaan, Prilaku, Etos Kerja* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), 108.

[17] Edi Susanto, "Revitalisasi Nilai Luhur Tradisi Lokal Madura", *Karsa Jurnal Studi Keislaman* Vol. XII No. 2 (Oktober, 2007), 101.

Politik kiai atau kiai politisi adalah kiai yang memiliki kecenderungan pada persoalan politik dan memilih belantara dunia sebagai ladang perjuangannya.[18] Sehingga dalam penelitian ini, politik kiai adalah kiai yang yang memiliki atau memimpin pesantren dan juga berperan serta dalam politik praktis.

Pendidikan pesantren pada dasarnya dirumuskan dari dua pengertian dasar yang terkandung dalam istilah pendidikan dan istilah pesantren. Kedua istilah itu disatukan dan arti keduanya menyatu dalam definisi pendidikan pesantren.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendidikan berarti proses pengubahan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.[19] Sedangkan dalam UU Sisdiknas Th. 2003 yang dimaksud pendidikan ialah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.[20]

---

[18] Moch. Eksan, *Kiai Kelana (Biografi Kiai Muchid Muzadi)* (Yogyakarta: LKIS, 2000), 6.
[19] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 1995), 232.
[20] UU RI No. 20 th. 2003.

Pesantren adalah sebuah tempat bersama atau komplek pendidikan Islam dan penuntut ilmu disebut dengan santri berada di dalamnya bersama ustad serta kiai.[21]

Selanjutnya Zamaksari Dhofir memberikan batasan tentang pondok pesantren yaitu sebagai asrama-asrama para santri yang disebut pondok atau tempat tinggal terbuat dari bambu, atau berasal dari kata *funduk* atau berarti hotel atau asrama. Perkataan pesantren berasal dari kata santri yang mendapat awalan *pe* dan akhiran *an* yang berarti tempat tinggal para santri.[22]

Dari beberapa istilah diatas peneliti memberikan istilah pendidikan pesantren dalam penelitian ini sebagai suatu lembaga Pendidikan Agama Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama di mana para santri menerima pendidikan agama Islam melalui sistem pengajaran atau madrasah yang sepenuhnya di bawah kedaulatan dan leadhership seorang kiai atau beberapa orang kiai dengan ciri khas dari pesantren tersebut.

G. Penelitian Terdahulu

Sejauh yang peneliti ketahui, selama ini belum didapatkan penelitian yang mengulas persoalaan politik kiai dan pendidikan pesantren terkait dengan dampak peran serta kiai dalam politik terhadap perkembangan pesantren yang diasuhnya. Hanya saja peneliti menemukan jenis penelitian yang memiliki kesamaan karakter dari segi berkiprahnya kiai dalam politik praktis, yaitu:

---

[21] Muctar Effendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001), 491.

[22] Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 18.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Endang Turmudi yang telah dibukukan dengan judul *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, terjemahan dari judul aslinya *Stuggling For The Umma: Changing Leadhership Roles of Kiai in Jombang East Java* (diterbitkan oleh LKiS tahun 2004). Penelitian ini menyoroti dua aspek penting dalam kepemimpinan kiai, *pertama* keterlibatan kiai dengan dunia politik. *kedua*, keterlibatan kiai tarekat terutama tarekat Qodariyah Naqsabandiyah dengan politik sehingga menyebabkan tarekat yang dipimpinnya menjadi pecah antara yang pro dan yang kontra.[23]
2. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Patoni yang telah dibukukan dengan judul *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik* (diterbitkan oleh Mizan tahun 2007). Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa kiai pesantren tidak terlepas dari dunia politik. Dalam penelitian dinyatakan bahwa kiai pesantren tidak terlepas dari dunia politik. Dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa peran kiai mempunyai peran ganda yaitu: *pertama*, dalam bidang agama dan *kedua* adalah memberi indikasi bahwa bagaimana kiai pesantren ikut dalam kancah politik.[24]
3. Disertasi Imam Suprayogo yang telah dibukukan dengan judul *Kiai dan Politik; Membaca Citra Politik Kiai* (diterbitkan oleh UIN Press tahun 2009). Dalam penelitian ini dikatakan bahwa banyak dari tipologi kiai yang terlibat dalam politik bahkan ada yang terjun langsung menjadi politisi. Dalam penelitian ini ada anggapan dari masyarakat apakah kiai

---

[23] Turmudi, *Perselingkuhan Kiai,*
[24] Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

pantas atau tidak terlibat langsung dalam dunia politik mengingat bidang keilmuan yang dimiliki lebih bernuansa keagamaan, sehingga dianggap cukup mengurusi umat di bidang keagamaan.[25]

4. Penelitian yang dilakukan oleh Zamaksari Dhofier yang telah dibukukan dengan judul *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai* (diterbitkan oleh LP3ES tahun 1994). Penelitian ini dilakukan di pesantren Tegal Sari dan Tebuireng. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa terjadi perubahan sosial dalam pesantren walaupun tidak mengubah akar substansial dari pesantren sendiri. Dalam hal politik Dhofier mengatakan bahwa politik pesantren merupakan Relegius Power, artinya keterlibatannya hanya sesuatu untuk kepentingan dakwah dan untuk pelestarian Islam dalam masyarakat. lebih lanjut ia mengatakan bahwa politik utama NU bukanlah politik yang berorientasi pada kekuasaan atau sumber material.[26]
5. Disertasi Zainuddin Syarif denga judul *Dinamika Politik Kiai dan Santri dalam Pilkada Pamekasan,* dalam penelitian ini disebutkan bahwa pertama, formula politik kiai yang digunakan dalam mempertahankan otoritas kepemimpinannya terhadap santri bertumpu pada dua kekuatan yaitu; Traditional dan Charismatic Domination, artinya kiai tetap mempertahankan pesona sebagai sosok kharismatik relijius melalui simbol-simbol kepatuhan yang dibingkai dalam moral agama dalam mempertahankan pergeseran dari kepatuhan politik keperbedaan politik

[25] Imam Suprayogo, *Kiai dan Politik: Membaca Citra Politik Kiai* (Malang: UIN-Malang Press, 2007).
[26] Dhofier, *Tradisi Pesantren*,.

walaupun hal itu dilakukan sebatas santri alumni. Dari prilaku politik santri tersebut ditemukan ada tiga tipologi politik santri yaitu: 1). Santri patuh mutlak, 2). Santri patuh semu, 3). Santri prismatic.[27]

6. Tesis Mohammad Muchlis Solichin, dengan judul *Kepemimpinan Kiai dalam Mobilisasi Kekuasaan Politik Umat (Studi Kasus Peran Kepemimpinan Kiai dalam Mobilisasi Kekuatan Umat Islam di Kabupaten Pamekasan pada Masa Reformasi),* dalam penelitian ini disebutkan bahwa para kiai di Pamekasan terlibat dalam politik, diantaranya adalah dengan adanya pembentukan suatu ikatan yang kuat diantara mereka dengan kerabat, santri dan pengikut mereka yang mempunyai berbagai kesamaan seperti kesamaan guru/almamater, visi politik dan visi paham keagamaan. Ikatan inilah yang nantinya melahirkan dua kubu politik besar di Pamekasan, yaitu PKB dan PPP yang keduanya sangat mendominasi perpolitikan di kabupaten Pamekasan. Hal ini dikarenakan kedua faksi ini didukung oleh kelompok kiai yang mempunyai pengaruh yang sangat luas di masyarakat.[28]

Dari beberapa penelitian terdahulu, terdapat kesan bahwa kiai banyak terlibat dalam politik, tetapi kajian terdahulu di atas tidak ada yang membahas secara khusus tentang bagaimana dampak peran serta kiai yang berpartisipasi dalam politik praktis tersebut terhadap perkembangan pesantrennya, sehingga penelitian ini diharapkan memberi data baru.

---

[27] Zainuddin Syarif, Dinamika Politik Kiai,.

[28] Mohammad Muchlis Solichin, Kepemimpinan Kiai dalam Mobilisasi Kekuasaan Politik Umat (Studi Kasus Peran Kepemimpinan Kiai dalam Mobilisasi Kekuatan Umat Islam di Kabupaten Pamekasan pada Masa Reformasi) (Tesis--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001),.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi penelitian ini, maka pembahasan dibagi menjadi lima bab. Uraian masing-masing bab disusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan: tentang tinjauan secara global permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini serta dikemukakan beberapa masalah meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang kajian pustaka yang terdiri dari: berbagai pandangan umum tentang politik kiai dan pendidikan pondok pesantren.

Bab ketiga membahas tentang metodologi penelitian.

Bab keempat membahas tentang profil kiai dan lembaga pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Bab kelima membahas tentang peran politik kiai pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan serta dampaknya terhadap pesantren yang dipimpinnya. Pada bab ini, diungkapkan data obyektif yang diperoleh melalui studi lapangan dan diklasifikasikan dalam tiga pokok sub bahasan.

Pertama tentang peran politik kiai pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Kedua, tentang motivasi dan orientasi peran politik kiai pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Ketiga, tentang dampak peran politik kiai pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan terhadap perkembangan Pondok Pesantren yang dipimpinnya?

Bab keenam merupakan kesimpulan dan saran dari uraian yang telah dikemukakan serta merupakan jawaban terhadap pokok masalah atau yang menjadi sentral dalam pembahasan tesis ini.